

**ANALISIS PEROLEHAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2017-2022****Anjani Fajrianti Raadhiyatun Mardhiyah¹, Faoziah Ulfah Fatmawati²**Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran^{1,2}¹email: anjani20001@mail.unpad.ac.id ²email: faoziah.ulfah@unpad.ac.id

Submitted: 23 June 2024

Accepted: 2 July 2024

Published: 3 July 2024

Abstract

The aim of this research is to understand the factors that are obstacles in collecting regional taxes for Sukabumi district in 2017-2022, so that by analyzing the effectiveness, contribution, growth rate and level of regional independence both before and during the pandemic, an evaluation can be carried out to overcome these obstacles. This research uses a qualitative descriptive method, with this approach the author will conduct an analysis of regional tax revenues, then conduct interviews with Bapenda and taxpayers to confirm these findings. The results of this research show that the taxes that make the most significant contribution in Sukabumi Regency come from the industrial sector, namely taxes on ground water, street lighting, PBB and BPHTB. The level of effectiveness of tax collection also shows good results, which always reach 100%, this achievement is due to Bapenda always making innovations in tax collection. The contribution made by local taxes to local revenue has contributed well, reaching 30-40%. Meanwhile, the rate of tax growth increased even though there was accumulation due to economic conditions and obstacles in managing regional taxes such as technical matters in the field, long distances and taxpayers who were less cooperative. This means that Sukabumi Regency's level of independence is still low, even though Bapenda is not directly responsible for the level of regional independence. However, Bapenda seeks to optimize Regional Original Income through various tax collection strategies.

Keyword: Regional Independence; Regional Original Revenue; Regional Taxes; Effectiveness; Contribution and Growth Rate

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk memahami faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam perolehan pajak daerah kabupaten sukabumi pada tahun 2017-2022, sehingga dengan melakukan analisis efektivitas, kontribusi, laju pertumbuhan dan tingkat kemandirian daerahnya baik sebelum maupun saat pandemi, dapat dilakukan evaluasi untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan ini penulis akan melakukan analisis mengenai perolehan pajak daerah, kemudian melakukan wawancara dengan pihak Bapenda dan wajib pajaknya untuk mengkonfirmasi temuan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak yang memberikan kontribusi paling signifikan di Kabupaten Sukabumi berasal dari sektor industri yaitu pajak air tanah, penerangan jalan, PBB dan BPHTB. Tingkat efektivitas pemungutan pajaknya pun menunjukkan hasil yang baik, dimana selalu mencapai 100%, pencapaian tersebut dikarenakan bapenda selalu melakukan inovasi dalam pemungutan pajak. Kontribusi yang diberikan pajak daerah terhadap Pendapatan asli daerah, sudah memberikan kontribusi dengan baik mencapai 30-40%. Sedangkan, untuk laju pertumbuhan pajaknya cenderung meningkat meskipun terdapat fluktuasi karena kondisi ekonomi dan tantangan dalam pengelolaan pajak daerah seperti, teknis di lapangan, jarak tempuh yang jauh serta wajib pajak yang kurang kooperatif. Hal tersebut yang membuat tingkat kemandirian Kabupaten Sukabumi masih rendah, meskipun Bapenda tidak secara langsung bertanggung jawab atas tingkat kemandirian daerah. Namun, Bapenda berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui berbagai strategi pemungutan pajak.

Kata Kunci: Kemandirian Daerah; Pendapatan Asli Daerah; Pajak Daerah; Efektivitas; Kontribusi dan Laju Pertumbuhan

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi yang berjalan dengan baik akan menghasilkan pembangunan yang lebih maju, pelayanan publik yang lebih baik, dan pada akhirnya, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya, meskipun otonomi daerah diberlakukan, masih banyak daerah yang belum bisa berdiri sendiri dalam membiayai pembangunannya. Berdasarkan laporan (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2022), dari 503 pemerintah daerah di Indonesia, 443 (88,07%) diantaranya masih belum mandiri dalam mengelola APBD. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum optimal dalam menggali sumber pendapatannya. Ketergantungan yang tinggi ini menunjukkan terdapat persoalan serius yang harus segera diatasi, karena jika dibiarkan dapat menimbulkan ketimpangan pembangunan antar daerah.

Menurut (Susilowati et al., 2021), meskipun pemerintah daerah menerima alokasi dana dari pemerintah pusat, pendapatan di setiap daerah berbeda-beda tergantung potensi dan keterampilan daerah dalam mengeksplorasi sumber kekayaannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memaksimalkan keunggulan yang ada di wilayahnya dan mencari sumber pendapatan tambahan agar lebih mandiri dalam mensejahterakan masyarakatnya. Peningkatan PAD merupakan kunci bagi kemandirian daerah dalam membangun wilayahnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan memaksimalkan potensi pajak daerah. Namun, masih banyak kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pajak daerah, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, sistem administrasi yang kurang efisien, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak daerah. Oleh karena itu, analisis kinerja pajak daerah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pajak daerah dan mencari solusi yang tepat untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Kabupaten Sukabumi merupakan lokasi yang ideal untuk melakukan penelitian ini karena memiliki potensi pajak yang besar, tingkat ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat, keberagaman potensi pajak, akses data yang mudah, dan relevan dengan isu-isu nasional terkait otonomi daerah. Potensi pajak di Kabupaten Sukabumi berasal dari sektor pariwisata, perdagangan, dan pertanian yang menjadi penyumbang utama terhadap PAD. meskipun Kabupaten Sukabumi memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan Pendapatan asli daerah yang cukup besar, namun tingkat kemandirian keuangan daerahnya masih rendah karena perolehan PAD belum mencapai potensi maksimalnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DPKAD yang dikutip oleh (Santosa, 2008), alasan pendapatan asli daerah

Kabupaten Sukabumi belum mencapai potensi maksimalnya, yaitu pemerintah daerah setempat belum maksimal dalam mengeksplorasi sumber-sumber kekayaan yang tersedia. Artinya, keunggulan yang dimiliki belum dimanfaatkan secara optimal. sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi potensi tersebut.

Penelitian mengenai pajak daerah terhadap PAD dan kemandirian daerah telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya, (Deswira, 2022) yang membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar masih dalam kategori yang rendah, sehingga kemandirian daerah ini masih terbilang kurang, serta terlalu bergantung dengan bantuan dana pusat. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam mengenai pajak daerah Kabupaten Sukabumi dengan mengidentifikasi dan menganalisis sumber perolehan pajak daerah secara menyeluruh untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah. Kajian ini merupakan modifikasi dari berbagai penelitian terdahulu, perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek dan tahun penelitian serta metode analisis yang digunakan untuk melihat kinerja pengelolaan keuangan daerah. Fenomena covid-19 juga akan menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana perolehan pajak daerah Kabupaten Sukabumi pada sebelum dan saat pandemi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan PAD Kabupaten Sukabumi dan membantu daerah mencapai kemandirian daerah sehingga dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi sumber pajak baru dan meningkatkan potensi pajak yang ada.

Penelitian mengenai kinerja pajak daerah sangat mendesak karena pajak daerah berperan signifikan dalam mendukung anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai pelayanan publik lainnya. Di tengah tuntutan masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa penerimaan pajak daerah dikelola secara efektif dan efisien. Kurangnya kinerja pajak daerah tidak hanya berdampak pada terbatasnya anggaran pembangunan, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap kinerja pajak daerah sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini.

Tujuan penelitian ini untuk memahami faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam perolehan pajak daerah kabupaten sukabumi pada tahun 2017-2022, sehingga dengan melakukan analisis efektivitas, kontribusi, laju pertumbuhan dan tingkat kemandirian daerahnya baik sebelum maupun saat pandemi, dapat dilakukan evaluasi untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan ini penulis akan melakukan analisis mengenai perolehan pajak daerah, kemudian melakukan wawancara dengan pihak Bapenda dan wajib pajaknya untuk mengkonfirmasi temuan tersebut.

Manfaat penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai peran pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendukung kemandirian daerah Kabupaten Sukabumi. Lalu, dapat memberikan saran dan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait peningkatan pendapatan asli daerah terumata dari sektor pajak. Serta dapat digunakan sebagai pedoman, referensi, dan sumber informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan topik atau melanjutkan studi lebih lanjut tentang peran pajak daerah.

2. KAJIAN LITERATUR

Teori utama yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah teori keagenan yang diadopsi dari pandangan (Jensen, M., C., 1976). Menurut teori ini, hubungan antara masyarakat dengan pemerintah dapat dianggap sebagai hubungan keagenan, dimana hubungan ini timbul karena adanya kontrak yang dibuat oleh masyarakat sebagai principal, dan pemerintah sebagai agen untuk menyediakan layanan yang menjadi kepentingan masyarakat.

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen penting dalam menjalankan desentralisasi. APBD memuat rencana seluruh pendapatan dan belanja daerah dalam satu tahun anggaran. Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan instrumen penting bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan daerah. APBD memuat rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang terdiri dari beberapa unsur seperti, rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran, Perkiraan pendapatan daerah dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan dari pemerintah pusat, serta batasan yang ditetapkan untuk setiap jenis pengeluaran Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah ialah penerimaan yang bersumber dari dalam daerah dan dikumpulkan sesuai dengan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan sumber pendapatan penting bagi daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Koswara dalam (Syahrial & Sotuyo, 2014) berpendapat bahwa Pemerintah Daerah seharusnya meminimalkan ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat, sehingga PAD harus menjadi komponen terbesar dalam sumber keuangan. Itu sebabnya, daerah otonom harus mempunyai kapasitas untuk mengeksplorasi dan mengelola sumber daya keuangan secara mandiri untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah.

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pilar utama dalam memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa, pajak merupakan kontribusi yang harus diberikan oleh masyarakat atau organisasi kepada pemerintah daerah dan bersifat paksa serta tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayarannya. Pendapatan ini difungsikan untuk kepentingan daerah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dengan memfasilitasi pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kebijakan pemerintahan lainnya (Maulida, 2018).

Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Salah satu aspek otonomi daerah dan desentralisasi yang perlu diperhatikan ialah proses pengelolaan keuangan daerah dan APBD. Pengelolaan keuangan daerah dan APBD merupakan pondasi penting dalam otonomi dan desentralisasi, kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat diukur menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Dalam proses analisis tersebut, terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan seperti rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian keuangan daerah, aktivitas, dan pertumbuhan (Deswira, 2022).

1) Kemandirian daerah

Menurut (Halim, 2004), rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan daerahnya. Berikut rumus yang dapat digunakan:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman}}$$

Rasio Kemandirian keuangan daerah mencerminkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pendanaan dari pemerintah pusat. Tabel berikut dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat pola hubungan dan kemampuan daerah dari sisi keuangan:

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: (Fathah, 2017)

2) Rasio Pertumbuhan

Menurut (Halim, 2004), rasio pertumbuhan digunakan untuk menganalisis sejauh mana pemda mampu mempertahankan dan terus meningkatkan keberhasilannya. Berikut adalah rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD tahun } p - \text{PAD tahun } p - 1}{\text{PAD tahun } p - 1} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pajak} = \frac{\text{Pajak tahun } p - \text{Pajak tahun } p - 1}{\text{Pajak tahun } p - 1} \times 100\%$$

3) Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah digunakan untuk menilai kinerja pemda dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan, dengan membandingkannya terhadap target yang



telah ditetapkan (Puspita Geatri Br Perangin-Angin, Erisma Adi Natalian, 2023).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel berikut dapat terlihat bagaimana proses pemungutan pajak daerah:

Presentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
<100%	Tidak Efektif
100%	Efektif Berimbang
>100%	Efektif

Sumber: (Fathah, 2017)

4) Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi pajak daerah merupakan suatu pendekatan untuk menilai sejauh mana pajak daerah ikut andil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

$$\text{Kontribusi Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Jenis Pajak} = \frac{\text{Realisasi Jenis Pajak}}{\text{Pajak daerah}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus ini, akan dihasilkan persentase yang mencerminkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD keseluruhan. Semakin tinggi persentase tersebut, semakin besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD.

Persentase	Tingkat Kontribusi
>50 %	Berkontribusi sangat baik
40% - 50%	Berkontribusi dengan baik
30% - 40%	Berkontribusi Cukup Baik
20% - 30%	Berkontribusi sedang
10% - 20%	Kurang berkontribusi
0% - 10%	Sangat kurang berkontribusi

Sumber: (Rahmawati & Dewi, 2020)

Kesenjangan Penelitian

Penelitian mengenai pajak daerah terhadap PAD dan kemandirian daerah telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya, (Deswira, 2022) yang membuktikan bahwa

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar masih dalam kategori yang rendah, sehingga kemandirian daerah ini masih terbilang kurang, serta terlalu bergantung dengan bantuan dana pusat. Penelitian selanjutnya dilakukan (Puspita Geatri Br Perangin-Angin, Erisma Adi Natalian, 2023), kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD tergolong kecil, yang menyebabkan rasio kemandirian keuangan Provinsi Jawa Tengah berada pada level yang rendah. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih bergantung pada pemerintah pusat dan belum memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya secara mandiri. Penelitian serupa mengenai analisis PAD di Kabupaten Sukabumi juga pernah dilakukan oleh (D. Kartika, 2016), yang membuktikan hasil yang sama bahwa tingkat kemandirian Kabupaten Sukabumi masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari ketergantungan yang signifikan pada pemerintah pusat, dimana kontribusi dana dari pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan perolehan pendapatan asli daerahnya. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam mengenai pajak daerah Kabupaten Sukabumi dengan mengidentifikasi dan menganalisis sumber perolehan pajak daerah secara menyeluruh untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah. Kajian ini merupakan modifikasi dari berbagai penelitian terdahulu, perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek dan tahun penelitian serta metode analisis yang digunakan untuk melihat kinerja pengelolaan keuangan daerah. Fenomena covid-19 juga akan menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana perolehan pajak daerah Kabupaten Sukabumi pada sebelum dan saat pandemi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menguraikan dan memahami fenomena atau keadaan secara mendalam. Data kualitatif bersifat rinci dan menyeluruh, sehingga analisisnya menjadi sangat spesifik dalam mengintegrasikan informasi dan menyajikannya dalam rangkaian analisis yang dapat dipahami oleh berbagai pihak (Ivanovich, n.d.).

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi yang terletak di Citepus, Pelabuhanratu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran dan tanggung jawab Bapenda sebagai institusi pemerintahan setempat yang bertanggung jawab langsung terhadap administrasi pajak, khususnya Pajak Daerah, di Kabupaten Sukabumi.

Objek penelitian ini mencakup 11 jenis Pajak Daerah yang berlaku di Kabupaten Sukabumi. Data mengenai pajak-pajak tersebut akan dianalisis untuk menghasilkan temuan penelitian. Hasil temuan ini akan divalidasi melalui sesi wawancara dengan pihak Bapenda yang memiliki pemahaman yang berbeda terkait pajak daerah untuk membatasi cakupan permasalahan yang diteliti, penelitian ini difokuskan pada beberapa aspek penting. Tujuannya adalah untuk menghindari perbedaan pandangan di antara pembaca. Oleh karena itu, batasan masalah dalam penelitian ini mencakup hal-hal berikut:

1. Fokus utama penelitian adalah pada sumber penerimaan pajak daerah.

2. Daerah yang menjadi objek penelitian yang akan dianalisis secara mendalam adalah Kabupaten Sukabumi.
3. Penelitian menggunakan data sekunder berupa target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah, terutama pajak daerah tahun 2017-2022, serta data primer berupa wawancara dengan pihak Bapenda mengenai perbedaan dalam penerimaan pajak daerah sebelum dan selama pandemi.
4. Permasalahan yang akan dikaji mencakup analisis kontribusi, laju pertumbuhan, efektivitas, tingkat kemandirian daerah, serta dampak pandemi terhadap penerimaan daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Potensi Pajak Daerah

Tabel 1. Realisasi Pajak Daerah Tahun 2017-2022

TAHUN	PAJAK DAERAH
2017	236.812.074.314
2018	235.667.581.514
2019	267.563.178.178
2020	271.104.869.700
2021	285.482.201.266
2022	296.141.722.905

Sumber: Bapenda Kabupaten Sukabumi (2024)

Kabupaten Sukabumi memiliki potensi ekonomi yang terus berkembang dengan berbagai sektor yang berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber utama PAD di Kabupaten Sukabumi adalah pendapatan dari 11 jenis pajak daerah. Berdasarkan tabel di atas, realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sukabumi dari tahun 2017 hingga 2022 menunjukkan kecenderungan fluktuatif namun dengan pola tren yang meningkat. Pada tahun 2017, realisasi pajak mencapai Rp 236.812.074.314, namun turun menjadi Rp 235.667.581.514 pada tahun 2018. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan signifikan hingga Rp 267.563.178.178. Meskipun ada pandemi pada tahun 2020, penerimaan pajak terus meningkat, mencapai Rp 271.104.869.700, dan pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi Rp 296.141.722.905.

Keberhasilan Kabupaten Sukabumi dalam mempertahankan stabilitas pendapatan pajaknya selama pandemi tidak lepas dari kerjasama antara Bapenda Kabupaten Sukabumi, perangkat desa, dan kecamatan dalam mengelola penagihan pajak daerah, terutama PBB-P2. Bapenda juga telah membentuk tim di setiap wilayah Kabupaten Sukabumi yang bertugas untuk menagih pajak daerah dan mengkoordinasikan aktivitas ini dengan perangkat desa dan kecamatan. Kabupaten Sukabumi dibagi menjadi 7 wilayah koordinasi untuk tujuan ini. Selain itu, pada tahun 2023, Bapenda menginisiasi kebijakan insentif fiskal dengan mengeluarkan peraturan bupati yang bertujuan untuk mendukung perekonomian daerah. Kebijakan ini mencakup penghapusan piutang pajak dan pengurangan pajak bagi wajib pajak yang mengajukan keberatan terhadap pembayaran pajak



mereka, yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi lokal untuk memberikan stimulus kepada masyarakat.

Selama periode penelitian, pajak yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari sektor industri. Empat jenis pajak yang paling signifikan dalam periode 2017-2022 adalah pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, pajak penerangan jalan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ini disebabkan oleh fokus Kabupaten Sukabumi dalam pembangunan infrastruktur, serta minat investor yang tinggi untuk membangun pabrik dan jalan tol di wilayah tersebut.

4.2 Efektivitas Pajak daerah

Analisis efektivitas bertujuan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target penerimaan pajaknya. Berdasarkan analisis efektivitas pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2017 hingga 2022, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah berhasil mengelola pajak daerah dengan baik. Meskipun terjadi fluktuasi dan penurunan dalam beberapa jenis pajak, sebagian besar tetap berada di atas target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sukabumi mencapai kinerja yang baik dalam mengelola berbagai jenis pajak.

Tabel 2 Efektivitas Pajak Daerah tahun 2017-2022

Tahun	Target	Realisasi	%	Kriteria
2017	203.291.000.000	236.812.074.314	116,49%	Efektif
2018	217.782.000.000	235.667.581.514	108,21%	Efektif
2019	251.577.000.000	267.563.178.178	106,35%	Efektif
2020	253.852.000.000	271.104.869.700	106,80%	Efektif
2021	269.732.000.000	285.482.201.266	105,84%	Efektif
2022	284.433.000.000	296.141.722.905	104,12%	Efektif

Sumber: *Bapenda dan olah data peneliti (2024)*

Pada tahun 2017, pajak daerah secara keseluruhan menunjukkan tingkat efektivitas 116,49%, yang dikategorikan sebagai efektif. Pada tahun 2018, efektivitas pajak daerah mengalami sedikit penurunan menjadi 108,21%, tetapi masih tetap efektif. Penurunan efektivitas terus berlanjut pada tahun 2019, mencapai 106,35%. Analisis efektivitas pajak daerah Kabupaten Sukabumi dari tahun 2020 hingga 2022, termasuk saat pandemi, menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan ekonomi, namun pemungutan pajak di Kabupaten Sukabumi mencapai 100%, menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target anggaran. Pada tahun 2020, seluruh jenis pajak menunjukkan efektivitas, dengan pendapatan mencapai 106,80%. Pada tahun 2021, efektivitas sedikit menurun menjadi 105,84%. Sedangkan pada tahun 2022, efektivitas mencapai 104,12%, meskipun terus terjadi penurunan.

Pemungutan pajak di Kabupaten Sukabumi selalu berjalan efektif karena Bapenda melakukan perencanaan yang terstruktur, dimulai dari RPJMD, Renstra, hingga Renja dengan target dan indikator yang jelas. Meskipun pandemi menimbulkan tantangan besar, Bapenda tetap harus menjaga kinerja maksimal karena hasilnya dievaluasi dalam laporan kinerja pertanggungjawaban pimpinan. Pada tahun 2020, terjadi penurunan target pajak yang biasanya meningkat setiap tahun, karena dampak negatif pandemi terhadap aktivitas ekonomi mengurangi potensi pajak. Penurunan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang sulit dan menjaga stabilitas keuangan daerah. Dengan langkah-langkah ini, pemungutan pajak di Kabupaten Sukabumi tetap efektif baik sebelum maupun selama pandemi, meskipun pemulihan ekonomi belum sepenuhnya tercapai meskipun efektivitas perolehan pajak selalu mencapai 100%, menunjukkan pencapaian yang positif.

4.3 Kontribusi Pajak Daerah

Analisis dilakukan untuk memahami seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah serta peran setiap jenis pajak dalam total perolehan pajak daerah dari tahun 2017 hingga 2022. Dengan analisis ini, kita dapat melihat pajak mana yang memberikan kontribusi terbesar dan memahami tren serta perubahan kontribusi masing-masing jenis pajak dari tahun ke tahun.

Tabel 3 Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2017-2022

TAHUN	PAJAK DAERAH	PAD	KONTRIBUSI	KRITERIA
2017	236.812.074.314	799.499.855.484	30%	Berkontribusi cukup baik
2018	235.667.581.514	565.369.086.733	42%	Berkontribusi dengan baik
2019	267.563.178.178	619.788.612.705	43%	Berkontribusi dengan baik
2020	271.104.869.700	660.864.870.832	41%	Berkontribusi dengan baik
2021	285.482.201.266	676.557.376.024	42%	Berkontribusi dengan baik
2022	296.141.722.905	752.707.315.701	39%	Berkontribusi cukup baik

Sumber: Bapenda dan olah data peneliti (2024)

Analisis kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukabumi selama periode 2017-2022 menunjukkan hasil yang cukup positif. Pada tahun 2018, terjadi penurunan perolehan pajak dan PAD akibat belum dilakukannya pembaruan tarif pajak, yang berdampak langsung pada kedua aspek tersebut. Tahun 2019 mencatat kontribusi pajak daerah terhadap PAD tertinggi selama periode tersebut, sementara kontribusi terendah terjadi pada tahun 2017. Sebelum pandemi COVID-19, kontribusi pajak daerah terhadap PAD menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Namun, selama pandemi dari tahun 2020 hingga 2022, meskipun perolehan pajak meningkat secara keseluruhan, kontribusinya terhadap PAD justru menurun.

Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan PAD yang lebih signifikan dibandingkan dengan kenaikan perolehan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kontribusi pajak selama pandemi meliputi perubahan kebijakan ekonomi yang memengaruhi tarif dan basis pajak, penurunan aktivitas bisnis di sektor-sektor tertentu seperti pariwisata dan perdagangan akibat pembatasan sosial dan penurunan mobilitas masyarakat, serta peningkatan ketidakpatuhan wajib pajak yang mengalami kesulitan finansial. Selain itu, kebijakan perpajakan baru dan efektivitas penagihan pajak juga turut memengaruhi kontribusi pajak terhadap PAD.

4.4 Laju Pertumbuhan Pajak Daerah

Analisis laju pertumbuhan pajak daerah dilakukan untuk melihat bagaimana penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Melalui analisis ini, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi penerimaan pajak.

Tabel 4 Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Tahun 2017-2022

TAHUN	REALISASI	SELISIH	LAJU PERTUMBUHAN
2017	236.812.074.314	-	-
2018	235.667.581.514	-1.144.492.800	-0,48%
2019	267.563.178.178	31.895.596.664	13,53%
2020	271.104.869.700	3.541.691.522	1,32%
2021	285.482.201.266	14.377.331.566	5,30%
2022	296.141.722.905	10.659.521.639	3,73%

Sumber: Bapenda dan olah data (2024)

Berdasarkan data dari tabel 4.25, pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Sukabumi dari tahun 2017 hingga 2022 menunjukkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2018, terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak sebesar -0,48% atau Rp. 1.144.492.800 dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2019, penerimaan pajak mengalami peningkatan signifikan sebesar 13,53% atau Rp. 31.895.596.664 lebih tinggi dari tahun sebelumnya, menandakan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif. Tahun 2020 mengalami pertumbuhan sedikit terhambat sebesar 1,32% atau Rp. 3.541.691.522, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil akibat pandemi. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan sebesar 5,30%, dengan tambahan penerimaan sebesar Rp. 14.377.331.366 dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan pemulihan ekonomi yang berlangsung baik. Pada tahun 2022, pertumbuhan tetap positif sebesar 3,73%, atau tambahan penerimaan sebesar Rp. 10.659.521.639. Meskipun tidak sebesar tahun 2019 dan 2021, pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan dalam penerimaan pajak daerah. Secara keseluruhan, meskipun terjadi fluktuasi setiap tahunnya, tren jangka panjang menunjukkan peningkatan yang stabil.

Fluktuasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, Bidang penagihan dan pelayanan mengungkapkan bahwa dalam pendataan objek dan wajib pajak di Kabupaten Sukabumi masih belum menyeluruh, baik dari segi pendataan maupun peremajaan data. Tantangan yang di had

dalam pemungutan pajak meliputi penghindaran pajak, kepatuhan wajib pajak, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak daerah. Faktor geografis Kabupaten sukabumi yang luas, jarak tempuh, dan infrastruktur yang terbatas, semakin mempersulit proses pemungutan pajak.

4.5 Kemandirian Daerah

Analisis kemandirian daerah penting untuk mengetahui seberapa jauh suatu wilayah bisa membiayai kebutuhan dan pembangunan dengan sumber dayanya sendiri. Hal ini membantu daerah mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat. Analisis ini juga membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan daerah, sehingga dapat dibuat strategi dan perencanaan yang lebih baik dalam memaksimalkan potensi daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah.

Tabel 5 Kemandirian Daerah Tahun 2017-2022

Tahun	PAD	Bantuan Pemerintah pusat	hasil	kemampuan	keterangan
2017	799.499.855.484	2.586.862.425.503	30,91%	rendah	konsultatif
2018	565.369.086.733	2.584.376.286.435	21,88%	rendah sekali	instruktif
2019	619.788.612.706	2.839.345.200.274	21,83%	rendah sekali	instruktif
2020	660.864.870.832	2.563.431.694.866	25,78%	rendah	konsultatif
2021	676.557.376.024	2.846.669.136.411	23,77%	rendah sekali	instruktif
2022	752.707.315.701	2.951.344.682.752	25,50%	rendah	konsultatif

Sumber: Bapenda dan olah data

Hasil analisis tabel 4.26 menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kabupaten Sukabumi dari tahun 2017 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, tingkat kemandirian mencapai 30,91%, masuk dalam kategori rendah dengan pola hubungan konsultatif, menunjukkan penurunan ketergantungan pada pemerintah pusat. Namun, pada tahun 2018, tingkat kemandirian menurun drastis menjadi 21,88%, termasuk kategori sangat rendah dengan pola instruktif, menunjukkan ketergantungan yang lebih besar pada pemerintah pusat. Tahun 2019, tingkat kemandirian sedikit meningkat menjadi 21,83%, masih dalam kategori sangat rendah. Pada tahun 2020, kemandirian kembali meningkat menjadi 25,78%, menunjukkan perbaikan dengan pola hubungan konsultatif. Pada tahun 2021, tingkat kemandirian turun lagi menjadi 23,77%, dan pada tahun 2022 sedikit meningkat menjadi 25,50%.

Meskipun Bapenda tidak bertanggung jawab langsung atas kemandirian daerah, mereka tetap berupaya mengoptimalkan PAD melalui berbagai strategi pemungutan pajak. Penerimaan pajak sangat penting untuk arah pembangunan, sehingga Bapenda terus berinovasi dalam pelayanannya. Salah satu strateginya adalah dengan mengadakan pelayanan terpadu dan bazar UMKM di daerah-daerah terpencil seperti Cikidang dan Jampang. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan perekonomian dan menyediakan layanan terkait pajak serta pelayanan publik lainnya. Selain itu, Bapenda meluncurkan mobil pelayanan ke

menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Bapenda Kabupaten Sukabumi akan membentuk Satgas PAD guna memaksimalkan penerimaan dan pengawasan wajib pajak untuk proyek jangka panjang, Mereka juga akan meluncurkan sistem pendaftaran dan pembayaran pajak online yang terintegrasi untuk memudahkan akses layanan pajak. Selain itu, Bapenda akan menyepadankan NIK dan NOP (Nomor Objek Pajak) untuk mempermudah pengawasan dan memperkuat basis data pajak. Hal ini dilakukan untuk membangun basis data pajak yang kuat dan optimal sebagai dasar tindakan dan kegiatan lebih lanjut.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi terkait perolehan pajak daerah tahun 2017-2022, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Secara keseluruhan, perolehan pajak daerah Kabupaten Sukabumi menunjukkan tren positif, baik sebelum maupun saat pandemi. Hal ini terjadi karena Bapenda bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menjaga stabilitas perolehan pajak serta terus melakukan inovasi dalam pemungutan pajak. Selama tahun penelitian, pajak yang paling signifikan dalam meningkatkan PAD berasal dari sektor industri. Hal ini dikarenakan Kabupaten Sukabumi masih fokus pada pembangunan infrastruktur dan investor lebih tertarik untuk membangun pabrik serta jalan tol di wilayah tersebut.
2. Selama periode 2017-2022, pemungutan pajak di Kabupaten Sukabumi selalu berada dalam kategori efektif. Saat pandemi, pemungutan pajak tetap efektif karena dilakukan penurunan target untuk beberapa jenis pajak. Meskipun efektivitas perolehan pajak selalu mencapai 100% yang menunjukkan pencapaian positif, namun pemulihan ekonomi belum sepenuhnya terjadi. Hal ini dikarenakan indikator ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan tanda-tanda negatif atau belum kembali ke tingkat sebelum krisis. ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi masih lesu.
3. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi selama tahun 2017-2022 menunjukkan hasil yang cukup baik, dengan rata-rata kontribusi 40%.
4. Laju pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Sukabumi dari tahun 2017 hingga 2022 menunjukkan adanya fluktuasi, namun secara keseluruhan tren jangka panjangnya tetap meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi ini meliputi kondisi ekonomi, pandemi, dan tantangan dalam pengelolaan pajak daerah seperti, teknis di lapangan, jarak tempuh yang jauh serta wajib pajak yang kurang kooperatif.
5. Tingkat kemandirian Kabupaten Sukabumi masih rendah, yang tercermin dari hasil analisis tahun 2017-2022 berada di rata-rata 25% sehingga campur tangan dari

pemerintah pusat masih dominan. Namun, Bapenda tidak secara langsung bertanggung jawab atas tingkat kemandirian daerah karena tugas dan fungsi Bapenda terbatas yaitu hanya mengelola pajak dan retribusi daerah. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, Bapenda Kabupaten Sukabumi telah berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui berbagai strategi pemungutan pajak, seperti meningkatkan pelayanan dengan sosialisasi, melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum, dan mengadakan Gebyar Sipenyu.

6. REFERENSI

- Deswira, A. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(1), 72–88.
<https://akuntansi.pnp.ac.id/jam>
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK: Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi Bisnis Dan Perbankan*, 8(1), 33–48.
<http://www.ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/download/109/97>
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah* (Edisi Revi). UPP AMP YKPN.
- Ivanovich, A. (n.d.). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 02(1998), 1–11.
- Rahmawati, A. S., & Dewi, R. P. (2020). View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk. *PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (Cucurbita Moschata) UNTUK SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MIE KERING*, 3, 274–282.
- Santosa, I. (2008). *33 Analisis dampak*. 7, 33–79.